Jurnal Akuntansi Manajemen Madani **ISSN 2580-2631**
Vol. 1, No. 1, Juni 2017

PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Fitriana Susanti
Muh. Amin Latief

STIE Madani Balikpapan

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of Entertainment Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, Waste/Health Services Retribution and Replacement Cost of Print Card and Deed Note Civilan Population Retribution to Regional Revenue in Balikpapan. This research used data in accordance which is publised by local government that financial year 2003 – 2014. Data analyse method that used for this research is Multiple Linear Regression Analyse.

F test showed that jointly independent variables affect the dependent variable, and partial showed that Entertainment Tax, Parking Tax, Waste/Health Services Retribution, and Replacement Cost of Print Card and Deed Note Civilan Population Retribution didn't have a significant effect of Regional Revenue whereas Street Lighting Tax has a significant influence of Regional Revenue.

Keywords : Entertainment Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, Waste/Health Services Retribution, Replacement Cost of Print Card and Deed Note Civilan Population Retribution, Regional Revenue

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Darise, Nurlan (2009:48) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah terjadi akibat dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunanaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensinya yaitu mengenai sumber-sumber pembiayaan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diantaranya dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemudian pada akhirnya kembali mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan beberapa sumber dari sekian sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang bertujuan untuk membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak dan retribusi.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2006:10). Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan (Siahaan, 2006:5).

Melanjutkan hasil dari penelitian Tarihan, Kariehan (2007) dengan judul "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan". Dalam penelitiannya secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Terkait Pendapatan Asli Daerah, Balikpapan sebagai salah satu contoh daerah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan

Timur, Kota Balikpapan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Primer di Provinsi Kalimantan Timur yaitu melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia Timur. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan potensinya sebagai kota jasa, kota transit yang dilengkapi dengan fasilitas jasa dan transportasi, Balikpapan merupakan simpul utama kegiatan di Kalimantan Timur mengingat kota ini merupakan jalur distribusi dan outlet dari dan ke kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan gambaran objek kota Balikpapan tersebut, dari banyaknya komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut/dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dari sektor Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan cukup dominan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan dari segi retribusi daerah, retribusi yang paling dominan yaitu retribusi jasa umum. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sangat dominan dibanding dengan jenis retribusi jasa umum lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik penduduk kota Balikpapan dalam Balikpapan dalam Angka 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup meningkat dari sebelumnya tahun 2003 sebanyak 486.580 jiwa meningkat menjadi 660.437 jiwa pada akhir tahun 2013. Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Kota Balikpapan yang kemudian secara tidak langsung mendorong Balikpapan menjadi kota tujuan urbanisasi sehingga hal tersebut membawa dampak positif yaitu semakin bertambahnya penduduk Kota Balikpapan sehingga akan meningkatkan berbagai permintaan ataupun konsumsi dari masyarakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, serta Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor perdagangan, jasa, dan industri dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu Tarihan, Kariehan (2007) yang menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah, retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan ?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan ?
4. Bagaimana pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan ?
5. Bagaimana pengaruh Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan ?
6. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan ?

Setiap penulisan harus memiliki batasan masalah dalam melakukan penelitiannya agar pokok permasalahan dari penelitian ini memiliki arah yang jelas. Untuk itu penulis memberikan batasan masalah dalam penelitiannya yaitu hanya pada Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan publikasi data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yaitu pada Tahun Anggaran 2003 – 2014.

KERANGKA TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Darise, Nurlan (2009:48) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2006:10). Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan (Siahaan, 2006:5).

Adapun jenis pajak dan retribusi yang penulis teliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Hiburan

   Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Pasal 1 ayat 24). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Pasal 1 ayat 25).

2) Pajak Penerangan Jalan

   Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2006:349).

3) Pajak Parkir

   Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Pasal 1 ayat 31).

4) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

   Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan pemerintah atas pelayanan persampahan/kebersihan (UU No. 28/2009).

5) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

   Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan pemerintah atas pelayanan persampahan/kebersihan (UU No. 28/2009).

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan variabelnya masa lalu dan saat ini dalam suatu periode tertentu dengan cara mengklasifikasikan, menghitung data berupa angka-angka atau data keuangan dengan menggunakan data yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan objek yang diteliti. Deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Sumber data yang digunakan bersumber dari data Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan yang dipublikasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yaitu Tahun Anggaran 2003 s.d 2014.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dengan teknik dokumentasi. Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode

dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan.

Metode analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Serta menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1
Gambar P-Plot Untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah

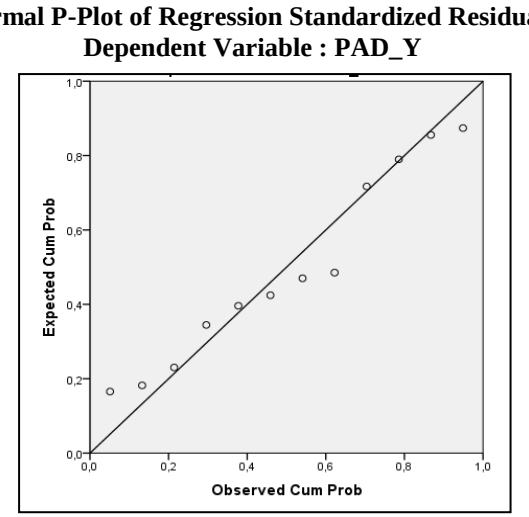

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa sebaran nilai residual berdistribusi di sekitar garis diagonal artinya bahwa model regresi menunjukkan pola yang berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Akan tetapi dalam uji normalitas residual dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak teliti karena secara visual terlihat normal. Oleh karena itu untuk lebih meyakinkan uji grafiknya, maka perlu juga dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,03072694
Most Extreme Differences	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,115
Kolmogrov-Smirnov Z		,460
Asymp.Sig.(2-tailed)		,984

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Dari tabel di atas diperoleh angka probabilitas. Nilai tersebut dibandingkan dengan taraf signifikasi atau α = 5% = 0,05 untuk pengambilan keputusan dengan berpedoman pada:

1) Nilai signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.
2) Nilai signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dikatakan normal.

Maka dapat dilihat dari Tabel 1 di atas bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* > angka probabilitas atau *0,984 > 0,05* artinya model regresi berdistribusi normal.

Tabel 2
Keputusan Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistic		Kesimpulan
	Tollerance	VIF	
Pajak Hiburan	0.017	59.493	Terjadi Multikolinearitas
Pajak Penerangan Jalan	0.021	47.086	Terjadi Multikolinearitas
Pajak Parkir	0.019	52.543	Terjadi Multikolinearitas
Retribusi Kebersiha	0.415	2.408	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Retribusi Biaya KTP dan Akta Capil	0.368	2.715	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Berdasarkan dari hasil output di atas pada Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir menunjukkan

terjadi multikolinearitas sedangkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak menunjukkan terjadi multikolinearitas.

Gambar 2
Gambar *Scatterplot* Variabel Dependen PAD

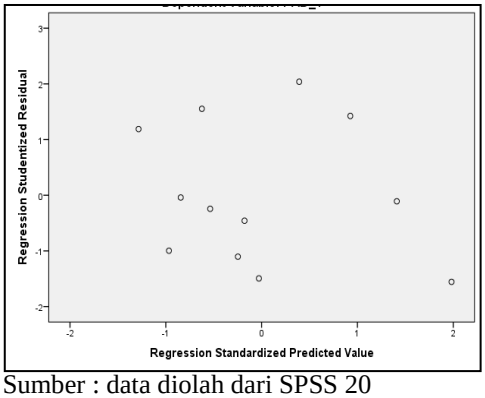

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Berdasarkan Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dimana titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 3
Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Sig
	B	Std Error	
(Constant)	1.164	2.769	,689
P.Hiburan	,040	,069	,581
P.Penerangan Jalan	-,072	,157	663
P.Parkir	-,017	,071	,816
Ret Kebersihan	,001	,030	,968
Ret. Biaya Cetak KTP dan Akta Capil	,005	,025	,855

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keenam variabel lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini berarti variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

Tabel 4
Durbin-Watson

R	R Square	Adj R Square	Durbin Watson
,0997	,994	,989	2.239

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 20 dengan menggunakan metode penyesuaian yang membuat kelembanan dari variabel dependennya, maka menghasilkan nilai *Durbin-Watson* untuk mendapat kesimpulan dari hasil uji autokorelasi. Nilai *Durbin-Watson* Watson sebesar *2,239*. Selanjutnya melalui uji tabel *Durbin-Watson* d_L dan d_U dengan *level of significant* 5% (0,05) diperoleh nilai sebagai berikut:

1) Nilai tabel DW untuk d_U (G ; k ; n) = (0,05 ; 5 ; 12) = 2,5061
2) Nilai tabel DW untuk d_L (G ; k ; n) = (0,05 ; 5 ; 12) = 0,3796

Karena nilai uji *Durbin Watson* $d_L < DW < 4-d_L$ atau *0,3796 < 2,239 < 4 - 0,3796* maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

R	R Square	Adj R Square
,0997	,994	,989

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Korelasi ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X1, X2, ...X5) secara serempak terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *R* sebesar *0,997* hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas : variabel Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan Pendapatan Asli Daerah.

Angka *Adjusted R Square* adalah sebesar *0,989.* Hal itu menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijelaskan dari kelima variabel bebas yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebesar *98,9%* sedangkan sisanya *1,1%* dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model

Tabel 6
Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,650	5,570		-,655	,537
	Pjk_Hiburan_X1	-,198	,139	-,348	-1,424	,204
	Pjk_Pnrgn_Jln_X2	1,330	,317	,913	4,200	,006
	Pjk_Parkir_X3	,216	,142	,349	1,519	,180
	R_Plynn_Prsmphn_Kbrshn_X4	-,001	,061	-,001	-,016	,988
	R_Pgntian_ByCtk_KTPdn_AktCpl_X5	-,138	,050	-,145	-2,784	,032

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Dari hasil output di atas pada Tabel 6, maka dapat diketahui sebagai berikut:

a. Pajak Hiburan
   1) Merumuskan Hipotesis:
      H_o: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hiburan terhadap PAD.
      H_a: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hiburan terhadap PAD
   2) Menentukan t_{hitung} dan tingkat signifikasi atau taraf nyata:
      Menentukan t_{hitung}
      Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh t_{hitung} yaitu *-1,424*.
      Menentukan tingkat signifikasi:
      Tingat signifikasi menggunakan = 5% (0,05).
   3) Menentukan t_{tabel} :
      Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 12-5-1 = 6, maka diperoleh t_{tabel} sebesar *2,447*.
   4) Kriteria Pengujian
      Ho diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$
      Ho ditolak apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$
   5) Membuat Kesimpulan
      Dengan demikian H_0 diterima karena $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau *-2,447 ≤ -1,424 ≤ 2,447,* artinya Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

b. Pajak Penerangan Jalan
   1) Merumuskan Hipotesis:

H_o: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD.

H_a: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD.

2) Menentukan t_{hitung} dan tingkat signifikasi atau taraf nyata:

Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh t_{hitung} yaitu *4,200.*

Menentukan tingkat signifikasi:

Tingkat signifikasi menggunakan = 5% (0,05).

3) Menentukan t_{tabel} :

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 12-5-1 = 6, maka diperoleh t_{tabel} sebesar *2,447*.

4) Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

5) Membuat Kesimpulan

Dengan demikian H_0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *4,200 > 2,447*, artinya Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.

c. Pajak Parkir

1) Merumuskan Hipotesis:

H_o: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Parkir terhadap PAD.

H_a: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Parkir terhadap PAD.

2) Menentukan t_{hitung} dan tingkat signifikasi atau taraf nyata:

Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh t_{hitung} yaitu *1,519.*

Menentukan tingkat signifikasi:

Tingkat signifikasi menggunakan = 5% (0,05).

3) Menentukan t_{tabel} :

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 12-5-1 = 6, maka diperoleh t_{tabel} sebesar *2,447*.

4) Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

5) Membuat Kesimpulan

Dengan demikian H_0 diterima karena $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $-2,447 \leq 1,519 \leq 2,447$, artinya Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

d. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1) Merumuskan Hipotesis:

H_o: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap PAD.

H_a: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap PAD.

2) Menentukan t_{hitung} dan tingkat signifikasi atau taraf nyata:

Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh t_{hitung} yaitu *0,016.*

Menentukan tingkat signifikasi:

Tingkat signifikasi menggunakan = 5% (0,05).

3) Menentukan t_{tabel} :

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 12-5-1 = 6, maka diperoleh t_{tabel} sebesar *2,447*.

4) Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

5) Membuat Kesimpulan

Dengan demikian H_0 diterima dikarenakan $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau *-2,447 ≤ 0,016 ≤ 2,447*, artinya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

1) Merumuskan Hipotesis:

H_o: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H_a: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) Menentukan t_{hitung} dan tingkat signifikasi atau taraf nyata:

Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh t_{hitung} yaitu *-2,784.*

Menentukan tingkat signifikasi:

Tingkat signifikasi menggunakan = 5% (0,05).

3) Menentukan t_{tabel} :

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 12-5-1 = 6, maka diperoleh t_{tabel} sebesar *2,447*.

4) Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

5) Membuat Kesimpulan

Dengan demikian H_0 ditolak karena $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau *-2,784 ≤ -2,447*, artinya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil berpengaruh signifikan secara negatif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 7
ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig
Regression	6.934	5	1.387	198.038	,000b
Residual	,042	6	,007		
Total	6.976	11			

Sumber : data diolah dari SPSS 20

Adapun langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis:

H_o: Secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil PAD.

H_a: Secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil terhadap PAD.

b. Menentukan F_{hitung} dan tingkat signifikasi atau taraf nyata:

Menentukan F_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS diperoleh F_{hitung} yaitu *198,038.*

Menentukan tingkat signifikasi:

Tingkat signifikasi menggunakan = 5% (0,05).

c. Menentukan F_{tabel} :

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α=5%, df 1 (jumlah variabel keseluruhan-1) atau 6-1=5 dan df2 dengan cara n – k – 1 (n : jumlah kasus dan k jumlah variabel independen) atau 12-5-1 = 6.

d. Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila F hitung ≤ F tabel

Ho ditolak apabila F hitung ≥ F tabel

e. Membuat Kesimpulan

Berdasarkan kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $198,038 \geq 4,3873$ sehingga H_o ditolak artinya secara bersama-sama Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil pengujian hipotesis dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, retribusi persampahan/kebersihan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Dari hasil pengujian secara simultan variabel independen menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan/Persampahan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

b. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Reribusi Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Penerangan Jalan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum di atas sebagai masukan untuk Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya Peninglatan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disarankan sebagai berikut:

a. Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan komponen yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan harus lebih meningkatkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta hendaknya meningkatkan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka realisasi pajak dan retribusi tersebut akan meningkat sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat.

b. Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini sudah bisa dikatakan baik untuk pembangunan Kota Balikpapan, namun dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang lainnya maka lebih baik untuk pembangunan Kota Balikpapan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

_____. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Balikpapan dalam Angka 2014. 2014. Balikpapan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan.

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : PT Indeks.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nariana. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jurnal Akuntansi. (Online).

Nasution, Dedi. 2014. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. Skripsi. Pekanbaru : Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Nirbeta, Hadis. 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012. Jurnal Akuntansi. Kota Tanjungpinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Kota Balikpapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Balikpapan 2013. 2013. Balikpapan : Badan Pusat Statistk Kota Balikpapan.

Siahaan, Marihot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : CV. Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Tarihan, Kariehan. 2007. Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan. Jurnal Akuntansi. (Online).

Umar, Husein. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Wirawan, I Gusti Putu Nata. 2013. Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. Jurnal Akuntansi. (Online).

Wulandari, Nurul. 2014. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. Tugas Akhir. Balikpapan: Program Diploma 3 STIE Madani.

Wardhani, Noviati Putri. 2010. Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Skripsi. Surabaya : Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtitas Pembangunan Nasional Veteran.

www.balikpapan.go.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2014.